



## Jaksa Gandeng Inspektorat

**GIANYAR** - Upaya Kejaksaan Negeri (Kejari) Gianyar mengungkap praktik curas dua oknum pegawai negeri sipil (PNS) Gianyar yang "memakan" aset milik Pemprov Bali terus dilakukan. Salah satu langkah rencana jaksa menggandeng pihak Inspektorat Pemkab Gianyar, guna melacak berapa aset lahan milik pemprov, yang telah diselewengkan dua PNS berinisial NPS dan IBNS tersebut.

Informasi yang didapatkan kemarin (10/10) menyebutkan, upaya tersebut dilakukan, tak lepas dari dukungan yang dilakukan Pemkab Gianyar untuk menyelesaikan kasus ini. Terlebih pihak Inspektorat Gianyar, sebelumnya sudah melakukan pemeriksaan kepada dua PNS tersebut, ketika kasus ini terungkap.

Dikonfirmasi mengenai hal itu, Kasipidus Kejari Gianyar Herdian Rahadi membenarkan informasi tersebut. Dia mengatakan, kroscek dilakukan jajarannya guna memastikan berapa lahan yang sudah diselewengkan kedua PNS tersebut. Selain itu, dengan mencocokkan data dengan pihak Inspektorat yang juga sudah memeriksa kedua tersangka itu, ■

► Baca *Jaksa...* Hal 31

## Masih Fokus ke Sewa Lahan

■ JAKSA

Sambungan dari hal 21

pihaknya bisa meminimalisasi penggunaan jasa akuntan publik yang akan menggerus biaya cukup besar. "Betul, dalam waktu dekat kami akan kroscek data tersebut dengan Inspektorat. Lagipula pihak Inspektorat sebelumnya juga sudah memeriksa mereka. Jadi nanti tinggal dicocokkan, data yang kami pegang dengan hasil pemeriksaan mereka. Daripada kami pakai akuntan publik, biayanya akan besar," paparnya.

Karena itu *lah*, pihaknya sendiri belum bersedia membeber berapa luas lahan yang diselewengkan dua oknum tersebut, dan titik-titik lokasinya, termasuk kerugian yang ditimbulkan. Sebab angka tersebut baru bakal pihaknya ungkap, ketika hasil penyidikan dan penghitungan sudah final.

"Saya kira Inspektorat juga akan mendukung langkah itu. Karena saya dengar, Bupati (Bupati Gianyar AA Bharata, Red) juga menginginkan kasus ini tuntas dan menginstruksikan Inspektorat. Sebab bagaimanapun, jika ini tidak tuntas, maka akan terus menjadi temuan BPK. Ini jelas tidak bagus bagi Gianyar, jika ingin mempertahankan opini WTP dari BPK," imbuhnya.

Disinggung mengenai kemungkinan munculnya tersangka baru, seperti dari pihak penyewa atau penggarap lahan pemprov tersebut, yang bisa jadi turut diuntungkan kedua tersangka,

Herdian menegaskan, pihaknya belum mengarah ke hal tersebut. Lantaran saat ini jajarannya fokus pada pengusutan uang sewa yang tidak disetor kedua tersangka ke pemerintah.

"Kami masih fokus ke uang sewa yang tidak disetor oleh dua orang ini. Kalau tambah melebar, nanti malam semakin kesulitan pembuktiannya," paparnya.

"Namun setiap informasi yang kami dapat, pasti menjadi tambahan buat kami. Salah satunya, ada yang sudah dapat izin menggarap, tapi yang dapat izin belum bayar uang sewa. Alasannya, tanah itu masih dipakai pihak desa di wilayah tanah itu berada," pungkasnya.

Seperti diketahui, NPS dan IBNS, oknum pegawai di Bagian Pertanahan dan Bagian Aset Setda Gianyar, sesuai prindik bernomor sprint 2135/P.1.15/FD.1/10/2015 yang dikeluarkan Kejari Gianyar, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Mereka diduga telah menggelapkan puluhan lahan milik Pemprov Bali, dengan modus membuat SK palsu, beserta tanda tangan bupati Gianyar palsu. Selanjutnya, berbekal SK palsu itu, lahan-lahan itu pun disewakan ke pihak lain, dan uang hasil sewa itu diduga masuk ke kantong keduanya.

Akibatnya, selain dibidik pihak Kejari Gianyar, kedua oknum pegawai ini pun juga mendapatkan sanksi dari Pemkab Gianyar. Karena mereka akhirnya "ditandang" dari SKPD asal mereka ke BKD Gianyar sebagai staf biasa. (wid/yes)

Edisi : Minggu, 11 Oktober 2015

Hal. : 21 dan 31